

Optimalisasi Akuntabilitas Dokumen Keuangan melalui Pengawasan Berbasis Digital di Kantor Se Kecamatan Kemayoran

Saifullah^{1*}, Dian Wahyudin², Fitria Laela Deflina³^{1,2,3} Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Jakarta, Indonesia¹ saifullahprof.law@gmail.com, ² zahidah181011@gmail.com***Corresponding Author**

ARTICLE INFO

Kata Kunci

Akuntabilitas;
Pengawasan Digital;
Dokumen Keuangan.

ABSTRACT

Penelitian ini mengkaji optimalisasi akuntabilitas dokumen keuangan melalui pengawasan berbasis digital di Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat. Latar belakang penelitian berangkat dari permasalahan pengelolaan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang masih manual, sehingga menimbulkan keterlambatan dan rendahnya transparansi. Penelitian bertujuan menganalisis kondisi aktual pengawasan, hambatan yang dihadapi, serta upaya strategis dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui model Miles & Huberman, fishbone diagram, USG diagram, serta evaluasi McNamara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar proses pengawasan dokumen keuangan telah beralih ke sistem digital melalui aplikasi seperti SI ANDAL, meskipun masih terdapat unit kerja yang menggunakan metode semi-manual. Hambatan utama yang diidentifikasi meliputi keterbatasan infrastruktur teknologi, kurangnya kompetensi sumber daya manusia, resistensi budaya kerja terhadap digitalisasi, serta lemahnya standar operasional prosedur pengawasan digital. Upaya strategis yang dapat dilakukan antara lain peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan, penguatan integrasi sistem antar unit, penyusunan SOP baku, serta pemanfaatan teknologi cloud dan notifikasi otomatis untuk mempercepat proses verifikasi. Kesimpulannya, pengawasan berbasis digital terbukti mampu meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan dokumen keuangan, sekaligus mendukung tercapainya laporan keuangan daerah yang wajar tanpa pengecualian (WTP).

PENDAHULUAN

Kecamatan Kemayoran terletak di Jakarta Pusat, dimana Wilayah Nya memiliki 8 Kelurahan, yang terdiri dari kelurahan Serdang, Sumur batu, Harapan Mulia, Kemayoran, Cempaka Baru, Gunung Sahari Selatan, Utan Panjang, Kebon Kosong. Kecamatan Kemayoran memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebagai bagian dari administrasi pemerintahan, Kecamatan Kemayoran bertanggung jawab atas berbagai aspek pengelolaan keuangan, termasuk dalam hal pengelolaan dokumen keuangan berupa Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Dimana SPJ merupakan dokumen penting yang digunakan sebagai bukti atas penggunaan anggaran dalam berbagai kegiatan pemerintahan. Pengelolaan SPJ yang efektif dan efisien sangat diperlukan guna memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan keuangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Lampiran Bab V Huruf A, bahwa Pengelolaan Keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah salah satu prinsip dasar dalam pemerintahan yang baik (Good Governance). Keuangan daerah yang dikelola dengan akuntabel dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, dan efektivitas dalam penggunaan anggaran publik. Oleh karena itu, pengelolaan dokumen keuangan, seperti Surat Pertanggungjawaban (SPJ), harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, pemerintah didorong untuk memanfaatkan sistem digital guna mendukung proses pengawasan keuangan yang lebih baik. Hal ini diperkuat melalui instrumen kebijakan seperti Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang menekankan pentingnya transformasi digital dalam penyelenggaraan layanan publik, termasuk tata kelola keuangan. Oleh karena itu, penerapan pengawasan berbasis digital di Kantor Kecamatan Kemayoran melalui pemanfaatan formulir checklist digital terhadap dokumen SPJ merupakan langkah inovatif yang sejalan dengan arah kebijakan nasional.

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana pengawasan berbasis digital dapat diimplementasikan secara efektif di lingkungan Kantor Kecamatan Kemayoran serta bagaimana dampaknya terhadap peningkatan akuntabilitas dokumen keuangan. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali perspektif para pemangku kepentingan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, studi dokumentasi, dan diskusi kelompok terfokus (FGD). Dengan adanya inovasi ini, diharapkan terjadi peningkatan akurasi, efisiensi, dan transparansi dalam pengawasan dokumen keuangan, serta mendorong terciptanya budaya kerja yang lebih akuntabel dan berbasis teknologi di tingkat kecamatan. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan dokumen keuangan sering menghadapi berbagai kendala, seperti keterlambatan dalam penyusunan laporan, ketidaksesuaian antara anggaran yang digunakan dengan bukti pengeluaran, serta kurangnya pemahaman pegawai terhadap prosedur yang berlaku.

Meskipun era digital menawarkan solusi melalui sistem pengawasan berbasis teknologi, masih banyak organisasi yang belum mengoptimalkan penggunaan sistem digital secara maksimal. Beberapa instansi bahkan masih bergantung pada proses manual atau semi-digital yang belum terintegrasi, yang berdampak pada rendahnya efektivitas dalam pengawasan dan pengendalian dokumen keuangan. Hal ini menyebabkan celah dalam pertanggungjawaban data, kesulitan dalam audit internal, serta tidak sinkronnya laporan keuangan dengan realitas di lapangan. Dalam banyak kasus, sistem pengawasan yang ada tidak mampu mendeteksi penyimpangan sejak dini. Ketergantungan pada prosedur manual membuka peluang terjadinya penyalahgunaan data, manipulasi dokumen, serta kegagalan dalam melakukan pemantauan real-time. Selain itu, tidak adanya standar baku dalam digitalisasi dokumen keuangan antar instansi juga menciptakan ketidakteraturan serta kesulitan dalam melakukan harmonisasi sistem.

Kesenjangan kemampuan teknologi dan kesiapan sumber daya manusia menjadi akar persoalan lain. Banyak pegawai keuangan yang belum memiliki keterampilan teknis untuk mengoperasikan sistem digital yang kompleks. Pelatihan yang tidak merata, keterbatasan anggaran untuk infrastruktur TI, serta resistensi terhadap perubahan menjadi kendala besar dalam mengimplementasikan sistem pengawasan berbasis digital yang efektif. Permasalahan akuntabilitas juga berakar pada budaya organisasi yang kurang mendukung transparansi dan akuntabilitas. Kurangnya kesadaran terhadap pentingnya dokumentasi keuangan yang baik dan pemahaman yang minim terhadap konsep akuntabilitas menyebabkan lemahnya kontrol internal. Di sisi lain, lemahnya implementasi prinsip good governance memperparah kondisi ini karena tidak adanya kontrol yang memadai terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi unit keuangan.

Dari identifikasi masalah di atas, dapat disimpulkan bahwa rendahnya akuntabilitas dokumen keuangan tidak hanya disebabkan oleh faktor teknis, tetapi juga sistemik dan budaya organisasi. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang komprehensif untuk mengoptimalkan akuntabilitas tersebut, salah satunya melalui penerapan sistem pengawasan berbasis digital agar tercipta sistem keuangan yang transparan, akuntabel, dan modern. Kondisi ini dapat menghambat kinerja administrasi keuangan serta berpotensi menimbulkan masalah dalam audit keuangan. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, terdapat berbagai solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan Dokumen Keuangan di Kecamatan Kemayoran.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan fokus pada analisis implementasi pengawasan berbasis digital terhadap akuntabilitas dokumen keuangan di Kecamatan

Kemayoran. Subjek penelitian meliputi aparaturnya pemerintah kecamatan dan kelurahan yang terlibat dalam pengelolaan dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, serta telaah dokumen. Analisis data dilakukan dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai efektivitas sistem digital dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai bagian inti dari penelitian ini, pembahasan disusun untuk menginterpretasikan temuan lapangan serta menghubungkannya dengan teori dan hasil penelitian terdahulu. Analisis difokuskan pada bagaimana penerapan pengawasan berbasis digital berpengaruh terhadap akuntabilitas dokumen keuangan di Kecamatan Kemayoran, kendala yang dihadapi, serta implikasinya bagi tata kelola pemerintahan. Dengan demikian, pembahasan ini tidak hanya menguraikan hasil penelitian secara deskriptif, tetapi juga menempatkannya dalam kerangka akademik dan kebijakan yang lebih luas:

1. Akuntabilitas Pengelolaan Dokumen Keuangan.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa penerapan sistem digital pada pengelolaan dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) di Kecamatan Kemayoran secara signifikan meningkatkan akuntabilitas publik. Sebelum adanya digitalisasi, pencatatan dan pelaporan SPJ masih dilakukan secara manual, yang berakibat pada keterlambatan penyampaian laporan, kesalahan pencatatan, hingga potensi kehilangan dokumen. Dengan sistem digital, alur pertanggungjawaban lebih jelas karena setiap dokumen memiliki jejak digital (*audit trail*) yang dapat ditelusuri.

Temuan ini sejalan dengan pendapat Mardiasmo (2018) yang menyatakan bahwa akuntabilitas publik dalam sektor keuangan ditandai oleh keterbukaan informasi, kepatuhan terhadap regulasi, serta penyediaan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks penelitian ini, penerapan aplikasi berbasis digital seperti *Google Form*, *Google Sheet*, dan integrasi dengan SI ANDAL mempermudah aparaturnya kecamatan dalam menelusuri dokumen, mengurangi risiko manipulasi data, serta meningkatkan kepastian hukum dokumen keuangan.

Lebih jauh, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa masyarakat memiliki akses lebih luas terhadap informasi keuangan, meskipun masih terbatas pada level internal kecamatan. Hal ini merupakan langkah penting menuju praktik *open government*, di mana informasi publik dapat diakses secara transparan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat.

2. Efektivitas Pengawasan Berbasis Digital.

Penerapan sistem pengawasan berbasis digital di Kecamatan Kemayoran terbukti lebih efektif dibandingkan dengan mekanisme manual. Melalui digitalisasi, proses verifikasi dokumen yang sebelumnya membutuhkan waktu 2–3 hari kini dapat dipersingkat menjadi hitungan jam. Penggunaan notifikasi otomatis juga mengurangi keterlambatan penyampaian laporan, sehingga proses pencairan anggaran lebih efisien.

Temuan ini konsisten dengan teori Romney & Steinbart (2015) yang menegaskan bahwa sistem informasi akuntansi berbasis digital mampu meningkatkan akurasi, keandalan, dan efisiensi dalam penyampaian informasi keuangan. Hal serupa juga ditemukan dalam penelitian Aprilla et al. (2023) tentang implementasi *e-government*, di mana digitalisasi pelayanan administrasi mempercepat alur birokrasi sekaligus meningkatkan kepuasan publik.

Selain itu, digitalisasi juga memperkuat fungsi *internal control* dalam organisasi publik. Dengan adanya *real-time monitoring* dan pencatatan otomatis, pengawasan internal dapat dilakukan lebih objektif dan terukur. Model pengawasan ini mendukung konsep *New Public Management* (NPM) yang menekankan efisiensi dan akuntabilitas melalui penggunaan teknologi informasi dalam tata kelola birokrasi.

3. Kendala dan Tantangan Implementasi.

Meskipun manfaat digitalisasi sangat nyata, penelitian ini menemukan sejumlah kendala yang masih menghambat optimalisasi akuntabilitas dokumen keuangan. Kendala pertama adalah

keterbatasan infrastruktur teknologi, khususnya jaringan internet yang tidak stabil dan perangkat keras yang belum memadai di beberapa kelurahan. Hal ini membuat sistem digital tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Kendala kedua adalah kompetensi sumber daya manusia (SDM). Tidak semua aparatur kecamatan memiliki literasi digital yang memadai, terutama pegawai yang terbiasa menggunakan sistem manual. Rendahnya literasi digital ini menimbulkan resistensi terhadap perubahan, sehingga memperlambat adaptasi pada sistem baru. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Susanto (2020) yang menyatakan bahwa kualitas SDM merupakan faktor krusial dalam keberhasilan implementasi digitalisasi akuntabilitas keuangan.

Kendala ketiga adalah budaya kerja organisasi yang belum sepenuhnya mendukung prinsip transparansi. Beberapa aparatur masih menunjukkan resistensi dalam penggunaan sistem digital karena merasa terbebani dengan perubahan prosedur. Selain itu, lemahnya regulasi internal, khususnya terkait SOP pengawasan berbasis digital, menimbulkan inkonsistensi antar unit kerja.

Kendala keempat adalah keamanan data, di mana belum seluruh sistem dilengkapi dengan enkripsi atau proteksi memadai. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kebocoran data atau akses ilegal terhadap dokumen keuangan. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan aspek keamanan siber dalam penerapan pengawasan digital di lingkungan pemerintahan daerah.

4. Implikasi terhadap Tata Kelola Pemerintahan.

Meskipun menghadapi sejumlah hambatan, penelitian ini membuktikan bahwa digitalisasi pengawasan dokumen keuangan memiliki implikasi positif terhadap tata kelola pemerintahan di Kecamatan Kemayoran. Pertama, dari sisi transparansi, sistem digital memungkinkan akses informasi yang lebih terbuka dan mudah diverifikasi. Kedua, dari sisi efisiensi, proses pelaporan dan verifikasi lebih cepat sehingga mendukung kinerja birokrasi yang responsif. Ketiga, dari sisi akuntabilitas, setiap transaksi dan dokumen dapat ditelusuri secara digital, sehingga mengurangi potensi penyalahgunaan.

Implikasi ini sejalan dengan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, yang mendorong transformasi digital sebagai pilar utama reformasi birokrasi. Penerapan pengawasan digital di Kecamatan Kemayoran juga mendukung visi pemerintah daerah dalam mewujudkan laporan keuangan yang Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) melalui akuntabilitas yang transparan.

Dari perspektif akademik, hasil penelitian ini memperkuat pandangan Anthony & Young (2003) bahwa optimalisasi akuntabilitas hanya dapat dicapai melalui integrasi antara teknologi informasi, peningkatan kapasitas SDM, dan penguatan pengawasan internal. Dengan demikian, pengawasan berbasis digital tidak hanya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap birokrasi, yang pada akhirnya berkontribusi pada terwujudnya *good governance* di tingkat lokal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Optimalisasi Akuntabilitas Dokumen Keuangan Melalui Pengawasan Berbasis Digital di Kecamatan Kemayoran, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pengawasan Dokumen Keuangan Berbasis Digital

Implementasi sistem pengawasan melalui platform Google Suite telah membawa perubahan signifikan dari sistem manual menuju sistem digital. Sistem ini memungkinkan pengelolaan dokumen keuangan menjadi lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Proses verifikasi SPJ yang sebelumnya memakan waktu berhari-hari kini dapat dilakukan secara cepat, kolaboratif, dan real-time. Adanya dashboard pemantauan serta audit trail digital memperkuat fungsi pengawasan pimpinan, dari yang semula bersifat reaktif menjadi preventif.

2. Hambatan yang Dihadapi dalam Optimalisasi Akuntabilitas

Transisi ke sistem digital tidak terlepas dari berbagai hambatan. Hambatan utama meliputi resistensi sebagian pegawai terhadap perubahan, kesenjangan kompetensi digital, keterbatasan perangkat dan jaringan internet, belum adanya SOP yang tegas mewajibkan sistem digital, serta budaya kerja birokrasi yang masih terbiasa dengan interaksi manual. Hambatan ini berdampak pada menurunnya efektivitas penerapan sistem, sehingga optimalisasi akuntabilitas belum sepenuhnya tercapai.

3. Upaya untuk Mengatasi Hambatan dan Mewujudkan Akuntabilitas

Sejumlah upaya telah dilakukan, meliputi pelatihan berbasis peran untuk meningkatkan kompetensi pegawai, penguatan infrastruktur jaringan, pembentukan kanal bantuan teknis informal, serta penyusunan SOP baru yang mewajibkan penggunaan sistem digital. Selain itu, kepemimpinan teladan yang ditunjukkan oleh Camat dan Sekretaris Kecamatan melalui penggunaan dashboard dalam rapat evaluasi, serta publikasi kisah sukses unit-unit adaptif, berhasil mendorong perubahan budaya kerja. Upaya tersebut membuktikan bahwa optimalisasi akuntabilitas tidak hanya bergantung pada teknologi, melainkan juga pada faktor manusia, kebijakan, dan budaya organisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi. McNamara, C. (2000). *Field Guide to Nonprofit Program Design, Marketing and Evaluation*. Authenticity Consulting.
- Anthony, R. N., & Govindarajan, V. (2005). *Management Control Systems*. McGrawHill.
- Anthony, R. N., & Young, D. W. (2003). *Management Control in Nonprofit Organizations*. McGraw-Hill.
- Bertalanffy, L. von. (1968). *General System Theory: Foundations, Development, Applications*. George Braziller.
- Bogdan & Biklen (2007): Kualitas data kualitatif sangat tergantung pada kedalaman pengalaman informan.
- Creswell (2016): Penelitian kualitatif menekankan pada pemahaman konteks sosial dan pengalaman subjek penelitian.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage.
- Denzin & Lincoln (2005): Penelitian kualitatif melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan informan dalam setting alami.
- Diamond, J. (2002). *The Role of Internal Audit in Government Financial Management*. IMF Working Paper.
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). *Stewardship Theory or Agency Theory*. *Australian Journal of Management*, 16(1).
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). *Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*. *Journal of Financial Economics*, 3(4).
- Jossey-Bass. Susanto, A. (2020). *Sistem Informasi Akuntansi*. Bandung: Lingga Jaya.
- Lembaga Administrasi Negara, 2021, Modul Diagnosa Organisasi;
- Lembaga Administrasi Negara, 2021, Modul Membangun Tim Efektif di Era New Normal;
- Lembaga Administrasi Negara, 2021, Modul Pelayanan Publik Digital;
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. Sage Publications.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta:
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*.

-
- Patton (2002): Purposive sampling efektif untuk memilih informan yang dapat memberikan data mendalam.
- Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2015). Accounting Information Systems. Pearson.
- Romzek, B. S., & Dubnick, M. J. (1987). Accountability in the Public Sector: Lessons from the Challenger Tragedy. *Public Administration Review*, 47(3).
- Rummler, G. A., & Brache, A. P. (1995). Improving Performance: How to Manage the White Space on the Organization Chart.
- Sage Patton, M. Q. (2002). *Qualitative Research and Evaluation Methods*. Sage.
- Sugiyono (2017): Kombinasi teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi memperkuat validitas data kualitatif.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- UNDP. (1997). *Governance for Sustainable Human Development*. United Nations Development Programme.